



*JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*

ISSN: 2622-3538

Available Online at <https://journal.umgo.ac.id/index.php/JSAP/index>

Vol. 6, No. 1, Juli 2023

DOI: 10.31314/jsap.5.1.1-7.2289

---

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

Felmi D. Lantowa<sup>1</sup>, Ismail Wirsan Yahya<sup>2</sup>

1. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

2. Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Indonesia

Email; [felmi.lantowa@umgo.ac.id](mailto:felmi.lantowa@umgo.ac.id), [ismailwirsan@gmail.com](mailto:ismailwirsan@gmail.com)

*Info Artikel: Diterima: 23 juni 2023, Disetujui: 3 juli 2023, Publish 8 juli 2023*

---

### **Abstract:**

*In the era of regional autonomy, they were given authority and responsibility in managing financial resources to ensure the prosperity of their people. One of the changes to the regional financial management system is the utilization of the Financial Accounting Information System. So it is very important for local governments to pay great attention to the performance of regional financial management. The purpose of this study is to determine the financial performance of the Gorontalo district government. The results of the study show that regional financial performance ratios in Gorontalo Regency during the 2017 – 2021 period show that all financial ratios have decreased from 2017 to 2020. Then in 2021 there will be improvements in terms of increasing financial performance when viewed from various financial ratios. So that the Gorontalo Regency Government must be able to maximize the potential that exists in the region to be able to improve financial performance which is generally lower than in 2017*

**Keywords:** *Regional Finance, Financial Performance, Financial Ratio*

### **Abstrak:**

Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Perubahan system pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo. Hasil Penelitian menunjukkan rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo selama periode 2017–2021 menunjukkan bahwa seluruh rasio keuangan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus dapat memaksimalkan potensi yang ada di daerah untuk dapat memperbaiki kinerja keuangan yang secara umum lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2017

**Kata kunci :** Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan

---

## PENDAHULUAN

Lahirnya otonomi menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada era otonomi daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber-sumber keuangan untuk menjamin kemakmuran rakyatnya. Menurut Mardiasmo (2012: 38), beberapa misi yang terkandung dalam sistem otonomi daerah adalah: pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah.

Temuan ini merupakan salah satu ukuran pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan keuangan, sehingga kemungkinan bahwa laporan keuangan Kabupaten Gorontalo belum maksimal. Karena di dalam instansi pemerintahan tersebut kurang memadainya komputer dan jaringan yang di sediakan sehingga menghambat transparansi laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu pengguna informasi keuangan perlu melakukan pendataan mengenai ketersediaan fasilitas untuk agar pengguna data dapat mengetahui kondisi keuangan suatu daerah dengan melakukan analisis. Jika hal ini terpenuhi maka system informasi akuntansi keuangan daerah kabupaten Gorontalo dapat mempengaruhi kinerja keuangannya.

Menurut Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul D. Kimmel dalam Hasnidar 2016 yang dikutip dalam *Accounting Principles* mengemukakan bahwa pengguna membutuhkan informasi yang rinci dan tepat waktu. Bagi para pengguna internal, akuntansi memberikan laporan-laporan internal. Selain itu, informasi yang telah diiktisarkan, disajikan dalam bentuk laporan keuangan agar memudahkan para pengguna dalam sistem informasi akuntansi dalam menerapkan kepada masyarakat agar masyarakat mampu mengetahui perkembangan laporan keuangan di dalam pemerintahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka topik tentang pengaruh Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Alat Analisis Rasio”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kuantitatif. Penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada atau terjadi saat itu juga, sehingga dapat memahaminya secara mendalam, dan akhirnya memperoleh data penemuan yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2012). Penemuan data merupakan gambaran atau gambaran realisasi. Penerapan penelitian deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu laporan realisasi pendapatan

dan belanja Daerah dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gorontalo. Data primer yang diperoleh secara langsung dari informan yang menjabat sebagai kepala, maupun sekretaris BPKAD Kabupaten Gorontalo. Sedangkan data sekunder berupa data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan berupa catatan atas laporan keuangan daerah. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dari sumber primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data (Sugiono, 2011) untuk diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, objektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Analisis deskriptif berisi penjelasan serta pemaparan dilakukan dengan cara menjelaskan rumus-rumus dengan kalimat yang dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan Metode kuantitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Rasio Keserasian Belanja Daerah (Halim, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh bahwa

#### a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan cara membandingkan antara total pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. rata-rata desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 sebesar 11,15 persen dikategorikan kurang baik sebagaimana berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal keuangan daerah dimana dibawah 20,00 persen merupakan kriteria kurang baik. Dimana untuk rasio desentralisasi tertinggi pada tahun 2017 dengan tingkat persentase mencapai 15,12%. Jika dibandingkan berdasarkan kriteria desentralisasi fiskal, pada tahun 2017 derajat desentralisasi memiliki kemampuan yang kurang (Purba dan Hutabarat, 2017). Demikian juga dengan tahun 2018-2021 yang derajat desentralisasinya berada di bawah 12%. Bahkan pada tahun 2020 berada pada kemampuan keuangan yang termasuk kategori sangat kurang.



**Gambar 1: Rasio Desentralisasi**

Sumber: Hasil Olah data 2022

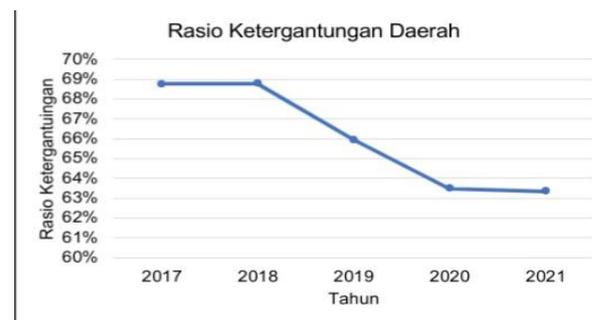
Untuk melihat perkembangan desentralisasi fiskal Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 secara *trend* menunjukkan kecenderungan terus berfluktuasi dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 15,12% persen kemudian pada tahun 2018 menurun menjadi 10,16% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 10,37% dan pada tahun 2020 kembali menurun menjadi 9,10% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 11,48%. Dengan Demikian desentralisasi fiskal pada tahun 2020-2021 menunjukkan pertumbuhan yang terus meningkat dan semakin baik, akan tetapi masih masuk kategori kurang.

#### b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara pendapat transfer dengan total pendapatan daerah.

pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi selama tahun 2017-2021 karena rasio ketergantungan keuangan daerah yang tertinggi yakni sebesar 68,79 persen. Jika di sesuaikan berdasarkan kriteria kinerja keuangan ketergantungan keuangan daerah dimana lebih dari 50 persen merupakan kriteria sedang (Halim, 2015). Maka pada tahun 2017-2021 merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan keuangan daerah dapat dikatakan belum maksimal hal ini dikarenakan rata-rata presentase sebesar 66,02 persen selama 5 tahun tersebut dan termasuk kedalam kategori yang sangat baik

gambar efektivitas keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 2 berikut:



**Gambar 2: Rasio Ketergantungan Daerah**

Sumber: Hasil Olah data, 2022

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan yang drastis. secara rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2017-2018 merupakan termasuk kedalam kriteria sangat tinggi dengan persentase dari 68,76 persen menjadi 68,79 persen sebagaimana berdasarkan kriteria ketergantungan keuangan daerah dimana lebih dari 50 persen dalam kriteria sangat tinggi. Walaupun pada tahun 2019-2021 terjadi penurunan yang besar tetapi hal ini belum dapat mendongkrak status ketergantungan keuangan daerah yang masih berada di kisaran 63,36% sampai dengan 65,94 persen yang masih termasuk kedalam kategori yang sangat baik.

#### c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target bantuan pemerintah pusat. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah pemerintah Kota Bandar Lampung pada tahun 2008-2017 menunjukkan persentase tingkat kemandirian

yang terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 tingkat kemandirian sebesar 93,81% dan pada tahun 2020 menjadi 33,18%. kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan yakni sebesar 45,59%. Rasio kemandirian tertinggi yaitu pada tahun 2017 dikategorikan tinggi dengan pola hubungan delegatif dengan persentase sebesar 93 persen sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 75-100 persen merupakan kriteria tinggi. Sedangkan tingkat kemandirian terendah yaitu pada tahun 2020 sebesar 33,18 persen menurut kriteria tingkat kemandirian keuangan daerah 25-50% persen merupakan kriteria tingkat kemandirian rendah. Dari data di atas terlihat rata-rata kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 sebesar 48,79 persen dikategorikan rendah sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana 25-50 persen merupakan kriteria rendah.



**Gambar 3: Rasio Kemandirian**

Sumber: Hasil Olah data, 2022

Untuk melihat perkembangan rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 secara *trend* menunjukkan kecenderungan terus menurun dengan persentase tertinggi pada tahun 2017 sebesar 93,81 persen sampai dengan tahun

2020 menurun menjadi 33,18% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 45,59%. Dengan Demikian rasio kemandirian pada tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dan semakin baik.

#### d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi selama tahun 2017-2021 karena rasio efektivitas keuangan daerah yang tertinggi yakni sebesar 171,43 persen. Jika di sesuaikan berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana lebih dari 100 persen merupakan kriteria sangat efektif (Mahmudi, 2013). Maka pada tahun 2017-2019 merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah di anggarkan sangat efektif sedangkan untuk tahun 2020-2021 merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah di anggarkan tidak efektif.



**Gambar 4: Rasio Efektifitas**

Sumber: Hasil Olah data, 2022

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio efektivitas keuangan daerah mengalami penurunan yang drastis. secara rata-rata rasio efektivitas selama tahun 2017-2019 merupakan kriteria sangat efektif dengan persentase dari 171.43% menjadi 109.03% sebagaimana berdasarkan kriteria kinerja keuangan efektivitas keuangan daerah dimana lebih dari 100 persen dalam kriteria sangat efektif. Akan tetapi pada tahun 2020-2021 merupakan kriteria kurang efektif dimana efektivitas sebesar 72,91% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 73,51%.

e. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan antara selisih dari realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini dan sebelumnya dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tahun ini. Berdasarkan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tahun 2017 merupakan yang tertinggi hal ini dikarenakan pada tahun tersebut rasio pertumbuhan PAD yang tertinggi yakni sebesar 32,22 persen. Kemudian pada tahun 2018 menurun drastis menjadi -28,67 persen. Kemudian pada

tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 4,67%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi -21,31%. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi -4,64 persen walaupun masih termasuk kedalam kategori negative. Jika di lihat rata-rata rasio pertumbuhan PAD selama tahun 2017-2021 berada di kisaran -4,64 persen.

Dari tabel 11 di atas dapat dibuat gambar efektivitas keuangan daerah sebagaimana dilihat pada gambar 5 berikut:



**Gambar 5: Rasio Pertumbuhan PAD**

Sumber: Hasil Olah data, 2022

Dilihat dari data di atas menggambarkan bahwa rasio pertumbuhan PAD mengalami fluktuasi yang tinggi dan berada di angka positif maupun negative. Walaupun pada tahun 2020 sempat berada pada titik -21,31 persen akan tetapi pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan menjadi -4,64%. Dan harapannya untuk tahun 2022 akan terus mengalami peningkatan yang berada di angka positif.

**Pembahasan**

a. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Pada tahun 2017 rasio

desentralisasi Kabupaten Gorontalo sebesar 15,12 persen berada pada tingkat kemampuan yang kurang baik. Pada tahun 2018 mengalami penurunan pada pendapatan asli daerah, dan total pendapatan daerah, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi keuangan daerah turun menjadi 10,16 persen berada pada tingkat kemampuan yang kurang baik, akan tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah, pendapatan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 10,37 persen dikategorikan kurang baik dan pada tahun 2020 derajat desentralisasi mengalami penurunan yang besar menjadi 9,10% dan merupakan rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah Kabupaten Gorontalo terendah selama periode tahun 2017 – 2021. Kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah sehingga hasil perhitungan rasio desentralisasi sebesar 11,48 persen dikategorikan kurang.

#### b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sedangkan nilai kriteria penilaian ketergantungan keuangan daerah Hasil dari perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat dari Tabel 10. Diketahui Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017 yaitu sebesar 68,76

persen, kemudian pada tahun 2018 yaitu sebesar 68,79 persen merupakan tahun dengan rasio tertinggi pada 5 tahun terakhir dan rasio terendah yaitu pada tahun 2021 yaitu sebesar 63,36 persen.

Rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi karena mencapai 66,01 persen. Menurut perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Total Pendapatan Daerah masih banyak yang berasal dari pendapatan transfer. Dan pendapatan asli daerah kabupaten Gorontalo masih tergolong kecil. Hal tersebut menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam memperoleh Pendapatan Daerah.

#### c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat. Hasil perhitungan pada lampiran 1 menunjukkan bahwa rasio kemandirian Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali dengan kemampuan kemandirian keuangan daerah sebesar 45,59 persen dikategorikan rendah dan termasuk rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo yang mengalami titik balik selama periode 2017-2021.

Pada tahun 2018, 2019, 2020, mengalami penurunan. Kemudian pada

tahun 2021 mengalami peningkatan pada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah diikuti dengan dana berimbang yang juga mengalami peningkatan yaitu pada dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus sehingga hasil rasio kemandirian menjadi 45,59 persen dikategorikan rendah. Pada tahun 2010 mengalami peningkatan pada retribusi daerah. Secara rata-rata kemampuan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo masih rendah dengan persentase sebesar 48,79 persen. Dilihat dari tabel 11 bahwa pendapatan asli Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi setiap tahunnya bahkan idetrik dengan penurunan tetapi hal ini diikuti dengan dana berimbang atau transferan dari pemerintah pusat yang semakin meningkat juga setiap tahunnya sehingga Kabupaten Gorontalo masih belum mandiri untuk membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahannya.

d. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli daerah

Rasio efektivitas keuangan daerah diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pendapatan asli daerah dengan target pendapatan asli daerah. Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada table 4.3 Rasio efektivitas keuangan daerah pada tahun 2017 sebesar 171,43 persen merupakan kriteria sangat efektif. kemudian mengalami penurunan pada pendapatan asli daerah tahun 2018 sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 123,55 persen dikategorikan sangat efektif menurut kriteria

pengukuran karena berada pada tingkat rasio di atas 100 persen. Akan tetapi pada tahun 2020 – 2021 rasio efektivitas keuangan daerah mengalami penurunan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sehingga hasil perhitungan rasio efektivitas menjadi 72,91 persen masuk dalam kategori efektif dan merupakan rasio efektivitas terendah selama periode tahun 2017-2021. Hal ini berarti kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan mengalami peningkatan dan penurunan.

Dilihat dari *trend* efektivitas keuangan daerah Kabupaten Gorontalo selama periode tahun 2017 – 2021 menunjukkan perkembangan yang kurang baik dengan tahun dasar yaitu tahun 2017 sebesar 171,43 persen. Kemudian pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan menjadi 72,91 persen sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 73,51 persen dan untuk tahun 2020 termasuk *trend* rasio kemandirian keuangan daerah terendah selama periode tahun 2017-2021.

e. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan (Growth Ratio) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi

potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Dari perhitungan rasio pada tabel 13 diatas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo pada Tahun Anggaran 2017-2021 rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, yang berfluktuasi, dengan rata-rata rasio pertumbuhan PAD sebesar -4,64%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa rasio kinerja keuangan daerah di Kabupaten Gorontalo selama periode 2017 – 2021 menunjukkan bahwa seluruh rasio keuangan mengalami penurunan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 mulai mengalami perbaikan dalam hal peningkatan kinerja keuangan jika dilihat dari berbagai rasio keuangan.

1. Secara keseluruhan rasio derajat desentralisasi keuangan daerah selama tahun 2017-2021 rata-rata 11,15% dan termasuk kategori kurang baik
2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama tahun 2017-2021 berada di sekitar 63,36% sampai dengan 68,76%. dengan rata-rata 66,01% dan termasuk kategori sedang.
3. Rasio Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 sangat fluktuatif dengan rata-rata sebesar 48,79% dan termasuk kategori rendah
4. Rasio efektifitas Pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo tahun

2017-2021 sangat fluktuatif dengan rata-rata 104,01% yang termasuk kategori sangat efektif.

5. Rasio Pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017-2021 sangat fluktuatif dari rasio negative sampai dengan positif, sehingga diperoleh rata-ratanya sebesar -4,64% Yang artinya Pertumbuhan PAD Kabupaten Gorontalo harus ditingkatkan
6. Secara Keseluruhan kinerja keuangan pemerintah kabupaten Gorontalo masih perlu di tingkatkan karena dari kelima rasio yang digunakan hanya satu rasio yang sangat efektif sedangkan empat lainnya termasuk dalam kategori sedang bahkan sampai kategori kurang baik.

## Referensi

### 1. Buku

- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Keuangan Dasar*. Yogyakarta: BPFE.
- Mahmudi, 2019. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Wempy Banga, 2017. *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah: Konsep, Teori, dan Fenomena di Era Otonomi Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.

## 2. Jurnal

- Agus Suryanto dan Refianto. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, September 2019, Vol.8 No.1 Hal 1 – 33
- A.R.Kaeng, 2015. “Analisis pendapatan asli daerah untuk belanja daerah pada pemerintah kota tomohon”. *Jurnal Emba.*, Vol. 3 No. 2 Juni (2015), h.960
- Akbar, Rusdi, Robyn Pilcher, dan Brian Perrin. 2012. “Performance measurement in Indonesia: the case of local government.” *Pacific Accounting Review* 24 (3): 262– 91. <https://doi.org/10.1108/0114058121128387>
- Bandi. 2014. Pengaruh respon perusahaan dalam investasi teknologi informasi terhadap kinerja perusahaan: strategi bisnis, kematangan teknologi informasi, dan ukuran perusahaan sebagai variabel anteseden. Fakultas ekonomi universitas sebelas maret, Surakarta
- Bertot, John Carlo, Paul T. Jaeger, dan Justin M. Grimes. 2012. “Promoting transparency and accountability through ICTs, social media, and collaborative e-government.” *Transforming Government: People, Process and Policy* 6 (1): 78–91. <https://doi.org/10.1108/17506161211214831>.
- Edward H, 2016. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widyapraja*, Vol XLII No. 1, Tahun 2016
- Fathiyah, I Nasution, B.N. Niko Pasla, F, Rasid dan M. Arif. 2022. Analisis Rasio Ketergantungan dan Kemandirian Daerah Dalam Mengukur Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Prajaiswara*. Volume 3 Number 1 Month June Year 2022 (65-74)
- Handoko A Hastoro dan Sunardi, 2016. Tata Kelola Publik Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 19 No. 1, April 2016
- Hasibuan, Harahap. 2013. Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, studi pada SKPD Kota Pekanbaru, Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Hasnidar. 2016. pengaruh sistem informasi akuntansi berbasis komputer dan pengendalian internal terhadap kualitas keuangan di instansi pemerintahan Kab. Bone (studi kasus satuan kerja pemerintahan daerah kab. bone). Skripsi. UIN Alauddin. Makasar
- Marjoni, Andi Mattulada Amir, Abdul Kahar, 2018. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap

- Kinerja Keuangan SKPD Kabupaten Sigi. e Jurnal Katalogis, Volume 6 Nomor 1 Januari 2018 hlm 63-74
- Nur Azlina dan Ira Amelia, 2014. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember – Vol. 12 No. 2 Des 2014*
- Nurul Mardiyah Pratiwi. 2017. Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Perusahaan pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Palembang. Skripsi Universitas Muhamadiyah Palembang.
- Purba, S. dan R.C. Hutabarat. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi. *Jurnal Ilmiah Kohesi 1 (1): 228-240.*
- Rendy dwi putra, 2017. *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten cianjur (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur).* Skripsi Unpas Bandung.
- Silviana dan Erwin Antoni. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Survey Pada Pemerintah Kabupaten Di Seluruh Jawa Barat. *Jurnal Profita, Volume 6. No, 1 April 2014*
- Wahyu, G. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tugas Akhir, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.*

### Website

- Badan Pusat Statistik, di akses April 2021  
<https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/929>
- Propenas 2002-2004 - UU N0.25 Th.2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.  
[http://perpustakaan-stpn.ac.id/opac/?p=show\\_detail&id=3068](http://perpustakaan-stpn.ac.id/opac/?p=show_detail&id=3068)
- Read.id. Pemkab Gorontalo Serahkan LKPD 2020 ke BPK <https://read.id/pemkab-gorontalo-serahkan-lkpd-2020-ke-bpk/>